

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, memainkan peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional. Pengembangan sektor industri yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia memegang peran penting dalam memajukan perekonomian nasional. Sektor industri memiliki implikasi positif terhadap penciptaan nilai tambah terhadap perekonomian serta dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rantai proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan ekspor hasil-hasil industri. Dengan demikian, pengembangan sektor industri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Pengembangan sektor industri yang berdampak pada pendapatan negara tidak hanya data dari sektor industri makro saja, tetapi juga dari industri kecil dan menengah (IKM).

Eksistensi industri kecil dan menengah (IKM) memegang andil yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kementerian Perindustrian menyoroti bahwa IKM memainkan peran krusial dalam mendukung ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Bahkan, IKM merupakan sektor yang cukup dinamis dan fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar. Dengan demikian, IKM menjadi cikal bakal inovasi dan kewirausahaan di banyak negara

berkembang (Wahyudi, 2022). Hal tersebut membuat IKM memiliki keunggulan dalam hal ketahanan ekonomi karena lebih cepat beradaptasi terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah dibandingkan dengan perusahaan besar (Suyadi & Suryani, 2018).

IKM sendiri merupakan unit usaha industri kecil dengan jumlah tenaga kisaran 5-19 orang serta 20-99 orang untuk industri menengah (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun skalanya kecil, IKM memiliki omset tahunan yang cukup besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, omset tahunan industri kecil mencapai Rp300 juta hingga Rp 2,5 miliar, sedangkan industri menengah memiliki omset antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun. Bahkan, Sepanjang 2023, sektor industri kecil dan menengah (IKM) kembali menegaskan peran sentralnya dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, IKM menyerap 65,52% dari total tenaga kerja Indonesia, persentase yang menunjukkan dominasi riil sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja. Reni Yanita, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), menggarisbawahi bahwa sepanjang tahun lalu, kontribusi IKM terhadap perekonomian nasional tak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan signifikansi struktural. Dengan populasi usaha mencapai 4,19 juta unit atau sekitar 99,7% dari total unit industri yang ada, sektor ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi yang tak bisa diabaikan, terutama dalam menciptakan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan (Yunianto, 2024).

Berdasarkan data terbaru dari BPS Tahun 2022, jumlah IKM yang ada di Indonesia mencapai 4,34 juta usaha dengan total pendapatan secara nasional sekitar

Rp521 miliar. Jumlah IKM terpusat di pulau jawa, yakni sekitar 62,58%. Sementara itu, 14,07% IKM terletak di Pulau Sumatera; 9,86% di Bali; 8,34% di Pulau Sulawesi; 3,44% di Pulau Kalimantan; serta 1,62% di Maluku dan Papua. Adapun provinsi dengan jumlah IKM terbanyak terletak di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 892.108 usaha atau sekitar 20,56%. Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan total 874.497 usaha (20,15%) IKM serta posisi ketiga ditempati Provinsi Jawa Tengah sebesar 667.795 usaha atau 15,39%. Di sisi yang lain, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan IKM terkecil yang hanya mencapai 0,12% dari total IKM Nasional (Badan Pusat Statistik, 2023).

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas secara nasional dalam hal jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM), dengan total lebih dari 4,17 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada dekade 2020-an. Komposisi ini mencakup 3,77 juta usaha mikro, 354 ribu usaha kecil, serta puluhan ribu unit usaha menengah. Peningkatan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dari 12,46% pada 2022 menjadi 14,89% pada 2023 yang mencerminkan peran krusial sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Dari perspektif makroekonomi, Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% pada 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, yang secara kolektif menyumbang 72,43% terhadap total PDRB. Di antara sektor-sektor tersebut, industri pengolahan, yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku IKM yang memegang peran dominan dengan kontribusi sebesar 33,93% terhadap struktur ekonomi provinsi. Bahkan, subsektor pengolahan

makanan dan minuman berhasil menyumbangkan nilai tambah bruto mencapai Rp231,33 triliun, atau setara dengan 43,68% dari total nilai tambah industri manufaktur Jawa Tengah pada tahun yang sama. Temuan ini mempertegas posisi strategis IKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang tidak bisa dipandang sebelah mata (Detik Jateng, 2024; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Angka tersebut tergolong besar dan mampu mendorong perekonomian di Jawa Tengah dengan signifikan. Menurut Badan Pusat Statistika (2023), di Jawa Tengah terdapat jenis IKM yang cukup variatif yang terdiri atas industri kulit, industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik dan logam; industri barang logam; industri tekstil; industri pakaian jadi; industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bara; industri makanan dan minuman; industri pengolahan tembakau; industri kertas dan barang dari kertas industri percetakan; industri kerajinan, industri alat angkut; industri reparasi dan pemasangan mesin pada peralatan; dan lainnya.

Di Jawa Tengah, sektor kerajinan cukup digemari, utamanya di Kota Solo, Kabupaten Pekalongan, hingga Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara sendiri terkenal dengan sentra ukir yang terkenal hingga mancanegara. Namun, perlu digarisbawahi bahwa industri kerajinan di Kabupaten Jepara tidak hanya sentra ukir tetapi juga kerajinan tenun, yakni tenun Troso yang menjadi satu-satunya kerajinan tenun khas Jepara. Tenun Troso diproduksi di Desa Troso, Desa Pecangaan Kulon, Desa Sowon, Desa Kaliombo, Desa Ngeling, Desa Menganti, serta Desa Pulodarat (Mifthofani, 2019). Namun, diantara desa-desa tersebut, Desa Troso merupakan desa pengasil tenun troso terbanyak, bahkan menjadi salah satu sumber mata

pencapaian masyarakat Desa Troso. Kegiatan menenun ini telah menjadikan Desa Troso sebagai daerah sentra industri tenun ikat di Kabupaten Jepara, sehingga kain tenun yang dihasilkan di sana dikenal sebagai tenun ikat troso. Terdapat beberapa produsen kain tenun ikat troso yang cukup terkenal di Desa Troso seperti, Tenun Ikat Dewi Shinta, Tenun Limo, Aida Tenun, Niki Tenun Troso, serta Zada Tenun and Shop, dll.. Dalam proses pembuatannya, tenun ikat troso masih menggunakan keterampilan tangan dan cara-cara tradisional, seperti memintal benang dengan alat tradisional seperti tenun *gedhog*, alat tenun bukan mesin (ATBM), hingga alat tenun mesin (Mifthofani, 2019).

Perkembangan IKM tenun ikat troso membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Jepara serta meningkatkan citra Jepara di tingkat internasional melalui kearifan lokal yang tercermin dalam kegiatan menenun. Bahkan, Desa Troso memiliki rekam jejak yang positif dalam mempertahankan motif asli Desa Troso yang telah dipatenkan di Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Per Mei 2020, tenun ikat troso sudah memiliki 115 motif yang telah dipatenkan, seperti motif Kedawung, motif Ampel, motif Belik Boyolali, dan motif Sicengkir. Di samping itu, Desa Troso telah meraih dua kali rekor muri, yakni pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai kain tenun terpanjang dengan panjang 217,4 meter serta pada tahun 2019 dengan penghargaan penenun terbanyak dengan 1.408 penenun (Jepara Hari Ini, 2024; Museum Rekor Dunia Indonesia, 2023; Perum Jamkrindo, 2023).

Tenun ikat troso tidak hanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian desa setempat melalui sektor industri tetapi juga melalui sektor pariwisata. Sebab,

tenun troso menjadikan Desa Troso sebagai desa wisata tenun troso yang kerap dikunjungi para wisatawan hingga turis dari mancanegara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2018, Desa Troso telah dikunjungi wisatawan sebanyak 36329 pengunjung dan hampir 1000 pengunjung diantaranya adalah wisatawan asing (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 2018). Meskipun sempat melesu di tahun 2020-2021 karena Covid-19, akan tetapi para wisatawan masih silih berganti mengunjungi Desa Troso hingga saat ini. Eksistensi Desa Wisata Tenun Troso juga menjadi bagian dari pengembangan IKM Tenun Ikat Troso itu sendiri yang turut menjadi perhatian dari Pemerintah Desa Setempat.

Guna mendorong pengembangan IKM Tenun Ikat Troso, Tentunya Pemerintah Desa Troso memainkan peran yang sangat penting di dalamnya karena pemerintah desa menjadi tonggak utama dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di wilayahnya sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa harus memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat, termasuk dengan memfasilitasi pembangunan perindustrian. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan modal, memfasilitasi akses IKM Tenun Ikat Troso terhadap pasar yang luas, membantu dalam hal pemasaran, dan lainnya. Pemerintahan Desa Troso juga selayaknya memperhatikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan memfasilitasi pengembangan industri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing IKM. Dengan demikian, industri kerajinan Tenun Troso yang dikembangkan akan lebih memiliki daya saing dan dapat tumbuh secara stabil.

Namun, IKM Tenun Troso turut mengalami berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat penciptaan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang ditujukan untuk mengetahui ciri khas dan budaya tenun troso yang menjadi pembeda dari tenun-tenun yang lain, yang pada nantinya dapat berimplikasi pada penguatan pengembangan ikat tenun troso. Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Mifthofani. W.A. pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Pengembangan IKM Tenun Troso di Kabupaten Jepara”.

Disamping itu, terjadi degradasi produksi motif pertama tenun ikat torso, yakni motif cemara dan lompong karena para pengrajin lebih mempertimbangkan aspek dagang daripada budaya. Dalam hal ini, produksi tenun ikat torso bermotif cemara dan lompong perlahan-lahan mulai terkikis karena permintaan pasar yang lebih banyak disesuaikan dengan keinginan customer. Hal tersebut membuat pengrajin acapkali memproduksi tenun ikat torso sesuai permintaan pasar saja. Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Rancangan Promosi Kain Tenun Troso Sebagai Warisan Budaya Jepara”.

Terlepas dari permasalahan tersebut, IKM Tenun Ikat Troso masih eksis dan mampu berdaya saing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anisah & Na’am (2021) yang berjudul “Eksistensi Tenun Troso Jepara di Antara Berdirinya Perusahaan-Perusahaan Garmen”, menunjukkan bahwa tenun ikat torso masih eksis meskipun telah berdiri perusahaan garmen yang ada disekitar Desa Troso seperti PT. Hwaseung Indonesia dan PT Parkland World Indonesia yang menyebabkan

masyarakat berbondong-bondong memadati perusahaan garmen. Namun, para pengrajin ikat troso memilih melanjutkan usahanya dan melestarikan budaya Jepara.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, masih sedikit peneliti yang mengkaji IKM Tenun Ikat Troso Jepara. Bahkan, belum ada penelitian yang secara khusus mendalami peran pemerintah desa setempat sebagai motor penggerak pengembang IKM Tenun Ikat Troso yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pengrajin. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan industri kecil menengah Tenun Ikat Troso serta apa saja peluang dan hambatan yang ditemui.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso?
2. Peluang dan hambatan apa saja yang ditemui dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso oleh Pemerintahan Desa Troso Kabupaten Jepara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Menganalisis peran Pemerintah Desa Troso Kabupaten Jepara dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso.
2. Menganalisis peluang dan hambatan yang ditemui dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso oleh Pemerintah Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat memberikan manfaat yang bermanfaat, baik untuk pengembangan pengetahuan ilmiah maupun kepentingan praktis. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran Pemerintah Desa Troso Kabupaten Jepara dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso.
- b. Mengetahui cara menganalisa peluang dan hambatan yang ditemui dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso oleh Pemerintah Desa Troso.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso.
- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna menambah wawasan pengetahuan kepada akademisi mengenai peran Pemerintah Desa Troso Kabupaten Jepara dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah tenun ikat troso, serta mengetahui masalah yang dihadapi dalam kegiatan upaya mendorong pengembangan industri tersebut.

c. Bagi Pemerintah Desa Troso

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana serta masukan bagi Pemerintah Desa Troso, yang berkaitan dengan upaya mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Tenun Ikat Troso untuk tahun-tahun berikutnya agar bisa lebih optimal.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori adalah suatu bentuk ringkasan yang menjelaskan dasar-dasar atau pemahaman umum yang mendasari alur pemikiran sebuah penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai dasar untuk mendukung atau menguatkan argumentasi peneliti dalam menganalisis suatu masalah. Dalam konteks ini, peneliti menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk menguatkan dan mendukung argumentasi peneliti serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori peran pemerintah desa serta teori industri kecil dan menengah.

1.5.1. Peran Pemerintah Desa

Setiap orang dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan perannya, setiap orang memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

latar belakang sosial kehidupannya. Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari posisi atau status seseorang dan terjadi saat seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya (Soekanto, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa peran dianggap telah dilaksanakan saat seseorang dengan posisi atau status tertentu telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Peran merujuk pada norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan serangkaian aturan yang memberi panduan bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah konsep yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah "pemerintah" berasal dari kata "perintah", yang berarti memberi instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet yang merupakan bagian dari pemerintah. Istilah "pemerintah" juga dapat diartikan sebagai tindakan (cara, hal, urusan, dan sebagainya). Pemerintah merupakan seluruh aparatur atau alat perlengkapan negara yang digunakan untuk menjalankan tugas dan kewenangan negara, baik kewenangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Jika memperhatikan negara Indonesia

saat ini, pemerintah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi.

Peran pemerintah adalah tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, yaitu tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau kebijakan mengenai regulasi. Fungsi pemerintah adalah mengarahkan masyarakat ke arah kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab dan dibantu oleh Perangkat Desa. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki peran untuk berpikir dan bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan di tengah masyarakat serta memiliki peran sebagai pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seorang pemimpin harus menjalankan perannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

Menurut pasal 67 tentang hak dan kewajiban Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan, serta berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Penjelasan undang-undang tersebut dapat dijadikan pedoman khususnya bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saat penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat desa, baik dari segi administratif, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peran ini menempatkan pemerintah desa sebagai pusat solusi untuk berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai penyelesai masalah (*problem solver*), pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, tetapi juga merumuskan strategi serta tindakan yang efektif dan partisipatif guna memastikan solusi yang diterapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam proses penyelesaian masalah ini, peran

pemerintah desa tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti dan diperkuat oleh fungsi-fungsi lain yang berkelanjutan, seperti fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator (Saputro & Rangga, 2015), seperti yang dijelaskan berikut ini:

i. Peran sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan pelatihan, pembinaan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitasi ini menjadi langkah kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk berkembang dan memecahkan masalah mereka sendiri.

ii. Peran sebagai Penghubung Sistem

Peran sebagai penghubung sistem, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemerintah daerah, hingga lembaga donor. Koordinasi ini sangat penting untuk menjamin sinergi antara program-program yang dilaksanakan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga upaya penyelesaian masalah dapat berjalan lebih lancar.

iii. Peran sebagai Motivator

Peran sebagai motivator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Semangat kerja sama, inovasi, dan aksi kolektif adalah beberapa hal yang ditekankan oleh pemerintah desa melalui

penyuluhan, kampanye, dan pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok yang berprestasi. Motivasi yang diberikan pemerintah desa ini menjadi pendorong utama dalam menciptakan aksi nyata di tingkat masyarakat.

iv. Peran sebagai Komunikator

Peran sebagai komunikatpemerintah desa bertugas menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Selain menyampaikan informasi, pemerintah desa juga harus secara aktif mengumpulkan umpan balik dari masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak hanya diketahui oleh masyarakat, tetapi juga didukung oleh mereka.

Dengan demikian, peran fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator merupakan bagian integral dari peran penyelesaian masalah yang dijalankan oleh pemerintah desa. Keempat peran tersebut secara sinergis mendukung terciptanya solusi yang tepat dan partisipatif bagi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Saputro & Rangga, 2015).

1.5.2. Industri Kecil dan Menengah

Industri adalah kegiatan atau usaha yang mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan menambahkan nilai tambah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari industri tersebut dapat berupa barang dan jasa, seperti pada industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan industri furniture. Eksistensi industri kecil dan menengah

(IKM) memegang andil yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kementerian Perindustrian menyoroti bahwa IKM memainkan peran krusial dalam mendukung ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Bahkan, IKM merupakan sektor yang cukup dinamis dan fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar. Dengan demikian, IKM menjadi cikal bakal inovasi dan kewirausahaan di banyak negara berkembang (Gole et al., 2022; Sri Susilo, 2010). Hal tersebut membuat IKM memiliki keunggulan dalam hal ketahanan ekonomi karena lebih cepat beradaptasi terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah dibandingkan dengan perusahaan besar (Permana et al., 2015).

Pada dasarnya, tidak ada definisi IKM secara pasti karena IKM memiliki pengertian yang beragam, tetapi pada dasarnya selalu mencakup dua aspek, yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokan perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diserap, seperti halnya pengertian industri kecil sendiri, yakni:

1. Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2012, industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan pengolahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau yang memiliki nilai yang lebih rendah menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dengan tujuan untuk dijual. Industri kecil dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan jumlah pekerja yaitu: (1) perusahaan atau industri rumah tangga yang memperkerjakan kurang dari 3 orang, dan (2) perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang memperkerjakan 1

sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak.

2. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam RIPIKKM (2002-2024), industri kecil adalah kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dan memiliki nilai penjualan pertahun sebesar Rp 1 miliar atau kurang.
3. Menurut Bank Indonesia, industri kecil adalah industri yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang bernilai kurang dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, industri kecil adalah usaha ekonomi produktif yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang lebih besar, yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut terdiri dari kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penjualan tahunan di atas Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019, industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang dan memiliki investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya sama dengan tempat tinggal pemilik usaha.

Industri Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga atau badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial. Industri ini memiliki omzet penjualan lebih dari Rp 1.000.000.000,- dan kekayaan bersih di atas Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-, tanpa termasuk tanah dan bangunan. Menurut Permenperin (2016), industri menengah memiliki minimal 20 orang karyawan yang bekerja dan nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,-.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan teori dari Saputro & Rangga (2015) untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan IKM Tenun Ikat Troso. Fokus utama adalah pada peran pemerintah desa sebagai penyelesai masalah (*problem solver*) yang kemudian diikuti oleh peran-peran pendukung lainnya, yakni fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator. Setiap peran ini memiliki keterkaitan dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku IKM Tenun Ikat Troso.

1. Peran sebagai Penyelesai Masalah (*Problem Solver*)

Dimensi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Troso berperan sebagai pemecah masalah, dengan cara mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku IKM Tenun Ikat Troso. Pemerintah desa

harus mampu menyusun strategi yang tepat dan partisipatif, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil melibatkan aspirasi dari para pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Proses penyelesaian masalah ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, administratif, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan IKM Tenun Ikat Troso.

2. Peran sebagai Fasilitator

Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Troso bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, pembinaan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku IKM. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pengrajin Tenun Ikat Troso, sehingga mereka dapat menghadapi perubahan pasar dan tantangan industri dengan lebih baik. Analisis dilakukan untuk meninjau apakah Pemerintah Desa Troso telah memberikan dukungan yang optimal dalam hal fasilitasi ini.

3. Peran sebagai Penghubung Sistem

Sebagai penghubung sistem, Pemerintah Desa Troso diharapkan mampu menjalin koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Di tingkat internal, koordinasi dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sementara itu, di tingkat eksternal, Pemerintah Desa Troso harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga donor, serta sektor swasta untuk memastikan bahwa program-program pengembangan IKM

berjalan sinergis dan terarah. Dalam konteks ini, penting untuk dianalisis sejauh mana koordinasi dan harmonisasi tersebut telah dilakukan.

4. Peran sebagai Motivator

Peran ini mengharuskan Pemerintah Desa Troso untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan IKM. Pemerintah desa perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana inovasi dan aksi kolektif dapat berkembang. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, kampanye, dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang menunjukkan kinerja yang baik. Dalam analisis ini, penting untuk melihat sejauh mana pemerintah desa mampu memotivasi pelaku IKM dan mengakui prestasi yang telah dicapai.

5. Peran sebagai Komunikator

Sebagai komunikator, Pemerintah Desa Troso berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan IKM Tenun Ikat Troso. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha memahami arah kebijakan yang diambil. Selain itu, pemerintah desa juga harus secara aktif mengumpulkan umpan balik dari pelaku IKM dan masyarakat, guna mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka. Analisis ini akan meninjau bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Troso, baik melalui pertemuan langsung, media cetak, maupun platform digital, dapat memengaruhi pengembangan IKM Tenun Ikat Troso.

Dengan demikian, setiap peran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Troso saling mendukung dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku IKM Tenun Ikat Troso, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun administrasi (Saputro & Ranga, 2015).

1.7. Argumen Penelitian

Pemerintah Desa Troso memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan IKM Tenun Troso. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa IKM Tenun Ikat Troso tidak dapat berkembang pesat tanpa adanya andil dari pemerintah desa setempat.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam rangka menemukan kebenaran tentang suatu fenomena yang diteliti. John W. Creswell menyatakan bahwa metode penelitian merupakan bagian dari ilmu yang membahas cara-cara melakukan penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya (Creswell, 2016).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuan pendekatan ini dalam mendalami fenomena sosial, peristiwa, atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu konteks tertentu. Seperti yang disarankan oleh Creswell & Creswell (2018),

penelitian kualitatif berfokus pada upaya membangun makna dari suatu fenomena berdasarkan perspektif narasumber yang terlibat. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh makna, pola, dan dinamika yang terjadi di Desa Troso sehubungan dengan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Troso.

Penelitian ini bersifat studi kasus, di mana studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk mendalami secara komprehensif suatu fenomena tertentu dalam konteksnya yang spesifik (Indrawan & Yaniawati, 2016). Dalam hal ini, objek kajian yang dipilih adalah industri tenun ikat Troso, dengan fokus utama pada peran strategis Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan sektor IKM di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai peran yang dijalankan oleh pemerintah desa, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam konteks pengembangan IKM tenun ikat tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Troso, yang terletak di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sebagai situs penelitian. Pemilihan situs ini didasarkan pada pertimbangan relevansi dan kemudahan akses informasi, mengingat peneliti berdomisili di Desa Troso. Lokasi ini juga dipilih karena memiliki konsentrasi industri kecil dan menengah (IKM) yang signifikan, dengan puluhan industri tenun ikat yang terdaftar di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang menunjukkan keberagaman dan kedalaman sektor

tersebut di desa ini. Penetapan Desa Troso sebagai situs penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan representatif, yang dapat dijadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya dalam mendalami peran Pemerintah Desa Troso dalam pengembangan IKM Tenun Ikat Troso.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah individu atau instansi yang dianggap memiliki pengetahuan relevan mengenai objek kajian dan dapat memberikan informasi yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang memilih narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), *purposive sampling* bertujuan untuk memilih narasumber yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan kontribusi substansial bagi hasil penelitian.

Pada penelitian ini, subjek yang dipilih meliputi pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan IKM Tenun Ikat Troso, antara lain Pemerintah Desa Troso, termasuk Petinggi Desa Troso dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pemilik dan pelaku industri tenun ikat di Desa Troso. Pemilihan subjek ini dilakukan dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi mereka terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan industri tenun ikat di desa tersebut. Selain itu, peneliti juga membuka kemungkinan untuk mengakses informasi

tambahan dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, jika diperlukan, guna memperkaya wawasan dan keakuratan temuan penelitian.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, peneliti kemudian menganalisis dan menyimpulkan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara mendalam dengan individu atau pihak yang memiliki pengetahuan langsung mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:

- a) Petinggi Desa Troso
- b) Ketua BPD Desa Troso
- c) Kelompok Sadar Wisata Desa Troso
- d) Pelaku Industri Kecil dan Menengah Tenun Ikat Desa Troso

Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan mendalam tentang pengembangan IKM Tenun Ikat Troso, serta pengalaman langsung dalam pembinaan dan

pengelolaan sektor ini. Peneliti memilih informan yang dapat memberikan informasi substantif untuk mendalami peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan IKM, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku industri tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang tersedia dalam bentuk tertulis, laporan, atau gambar yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini terdiri dari berbagai dokumen resmi, catatan administratif, dan laporan program kerja dari Pemerintah Desa Troso yang terkait dengan upaya pengembangan IKM Tenun Ikat Troso. Peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa lokasi yang terkait dengan kegiatan IKM, seperti Balai Desa Troso, acara Troso Festival, dan galeri pameran produk Tenun Ikat Troso. Observasi ini bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari dokumentasi, serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika dan partisipasi para pelaku IKM dalam *event-event* desa. Dengan demikian, data sekunder yang dikumpulkan menjadi penting untuk mendukung temuan penelitian dan memperkaya analisis yang dilakukan.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Teknik

pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan mengolahnya sehingga dapat disajikan dengan bentuk yang mudah dipahami. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pertukaran informasi melalui percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung atau wawancara memerlukan panduan wawancara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada:

- a) Petinggi Desa Troso
- b) Ketua BPD Desa Troso
- c) Kelompok Sadar Wisata Desa Troso
- d) Pelaku Industri Kecil dan Menengah Tenun Ikat Desa Troso

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni semua bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena permintaan seorang penyidik. Berdasarkan pendapat ini, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pencatatan, analisis, dan pemanfaatan data yang disediakan oleh instansi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh dari Pemerintahan Desa

Troso meliputi kegiatan dan program pemerintah desa, serta foto-foto dokumentasi pameran atau agenda yang terkait dengan pengembangan IKM, di antaranya ada agenda Troso Festival.

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat partisipatif dan deskriptif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku, proses, dan interaksi yang berkaitan dengan objek kajian. Peneliti tidak hanya mengamati secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang relevan, yang memungkinkan pengumpulan data secara kontekstual dan empirik.

Selama proses observasi, peneliti turut serta dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan IKM Tenun Ikat Troso. Peneliti terlibat langsung dalam agenda-agenda penting, seperti menjadi peserta dalam pemilihan Duta Tenun Troso Festival sampai peneliti mendapatkan *title* sebagai Duta Tenun Troso 2023. Keterlibatan ini memberikan kesempatan untuk mengamati dinamika festival dari perspektif penggerak acara, serta interaksi antara pemerintah desa, pelaku IKM, dan masyarakat luas. Selain itu, peneliti juga mewakili Desa Troso dalam agenda nasional seperti BISAFEST yang diselenggarakan bersama Kementerian Pariwisata dan MPR RI, yang menjadi ajang penting untuk promosi Tenun Ikat Troso di luar kota dan luar daerah.

Selain itu, peneliti juga berperan sebagai model dalam pameran produk Tenun Ikat Troso yang diadakan di tingkat kabupaten, yang memberikan wawasan mengenai strategi pemasaran dan persepsi publik terhadap produk lokal. Dalam setiap kegiatan tersebut, peneliti mendalami berbagai aspek interaksi sosial, kolaborasi antar pihak, dan dampak promosi terhadap perkembangan industri.

Observasi ini juga dilakukan di lokasi-lokasi strategis lainnya, seperti Balai Desa Troso, ruang produksi pelaku IKM, dan kegiatan pelatihan yang melibatkan lembaga mitra desa. Selama proses observasi, peneliti mencatat fenomena-fenomena seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam festival, dinamika interaksi antara pelaku IKM dan pemerintah desa, serta praktik administratif seperti pengurusan surat keterangan usaha oleh pengrajin sebagai syarat pengajuan modal usaha. Sehingga, observasi partisipatif ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ekologi sosial dan institusional yang mendukung pengembangan IKM Tenun Ikat Troso, serta menyajikan temuan yang lebih kaya dan mendalam mengenai realitas yang ada di lapangan.

1.8.6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses untuk bekerja dengan data yang diperoleh dari penelitian, yang mencakup kegiatan mengatur, memilah, menyintesis, menemukan pola, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang

signifikan dari data. Sebagaimana dijelaskan oleh Seidell (dalam Moleong, 2017), proses analisis data kualitatif melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, yang diberi kode agar sumber datanya dapat dilacak.
2. Mengumpulkan, memilih, mengelompokkan, menyintesis, menyimpulkan, dan mengindeks data.
3. Berpikir, dengan cara membuat kategori data menjadi bermakna, mencari dan menemukan hubungan, serta menemukan temuan umum.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, agar dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan yang dicontohkan oleh data. Mengorganisasikan data dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorisasikannya, dengan tujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja.

Menurut Miles dan Huberman (Moleong, 2017), metode yang digunakan dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi dengan para narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti Petinggi Pemerintahan Desa Troso, Ketua BPD Desa Troso, Kelompok Sadar Wisata Desa Troso, serta pelaku IKM di Desa Troso.

2. Reduksi data, merupakan tahap pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan. Peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari gambaran umum dan wawancara dengan Petinggi Pemerintahan Desa Troso,, Ketua BPD Desa Troso, Kelompok Sadar Wisata Desa Troso, serta pelaku IKM di Desa Troso, kemudian data tersebut dikelompokkan, diarahkan, dan diorganisasikan dengan membuang hal-hal yang tidak perlu sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan yang lebih jelas dan terfokus pada judul penelitian.
3. Penyajian data merupakan tahap penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data yang kemudian disajikan, data tersebut meliputi peran pemerintah desa dalam mendorong pengembangan IKM yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Troso, serta faktor penghambat pelaksanaan peran tersebut. Selanjutnya, penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data, yaitu interpretasi data yang telah direduksi oleh peneliti dan dihubungkan dengan fokus penelitian.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap pengelompokan data yang sudah diolah dan disajikan secara sistematis serta pada akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan peran Pemerintahan Desa Troso dalam mendorong pengembangan industri kecil dan menengah Tenun Ikat Troso.

1.8.7. Kualitas Data

Keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk memastikan kredibilitas dan integritas temuan penelitian. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Pendekatan ini membantu menguji konsistensi dan kebenaran data yang telah dikumpulkan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dengan demikian, triangulasi berperan penting dalam meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil penelitian, serta memperkuat argumen yang dihasilkan melalui perbandingan data dari berbagai perspektif yang relevan.

1.9. Batasan Penelitian

Dalam rangka menjaga fokus, kedalaman, dan ketercapaian tujuan penelitian secara sistematis, penelitian ini diberi batasan-batasan tertentu yang ditetapkan secara sadar oleh peneliti. Batasan ini penting untuk menghindari perluasan topik yang dapat mengaburkan arah analisis dan mengurangi validitas temuan. Penelitian ini secara khusus hanya membahas mengenai peran Pemerintah Desa Troso dalam mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Troso, dengan fokus utama pada empat aspek peran strategis sebagaimana dikemukakan oleh Saputro dan Rangga (2015), yakni melakukan penyelesai masalah (*problem solver*) melalui peran pemerintah desa sebagai fasilitator, penghubung sistem, motivator, dan komunikator.

Adapun cakupan temporal dalam penelitian ini dibatasi pada rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2023, yaitu periode ketika Pemerintah Desa Troso mulai secara aktif menggulirkan berbagai program, fasilitasi, dan intervensi kebijakan terhadap pelaku IKM Tenun Ikat Troso, baik melalui agenda desa, kolaborasi antar-lembaga, maupun aktivasi program promosi pariwisata berbasis kerajinan lokal. Batasan waktu ini dipilih karena merepresentasikan dinamika pasca pandemi COVID-19 yang mendorong adaptasi serta pemulihan sektor industri kecil berbasis komunitas.

Penelitian ini tidak mencakup analisis komparatif antara Desa Troso dan desa penghasil tenun lainnya, maupun tidak menelaah secara mendalam aspek teknis produksi, rantai distribusi produk, atau strategi pemasaran oleh pelaku IKM secara individual. Penelitian ini juga tidak membahas secara luas peran lembaga lain di luar struktur Pemerintahan Desa, seperti perbankan, NGO, maupun peran pemerintah kabupaten atau provinsi, kecuali jika berkaitan langsung dengan inisiatif atau kolaborasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Troso.

Penelitian ini juga masih terbatas pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak internal di Desa Troso. Sehingga, informasi dari pihak eksternal yang relevan, seperti pihak DISPERINDAG Kabupaten Jepara, KMJS, UNISNU, UMK, dan lembaga lainnya, tidak diikutsertakan sebagai informan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, mengingat keterlibatan berbagai lembaga eksternal juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan IKM Tenun Ikat Troso.

Selain itu, pada saat penelitian ini selesai, agenda Troso Festival di tahun berikutnya tidak lagi diadakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat mengeksplorasi secara lebih lanjut pengaruh dari Troso Festival terhadap perkembangan IKM Tenun Ikat Troso dalam jangka panjang, yang menjadi penting dalam menilai keberlanjutan dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan sosial di Desa Troso.